

**PERAN GEREJA DALAM TATA KESELAMATAN UMAT MANUSIA MENURUT
ARMADA RYANTO DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEMANDIRIAN
MARTABAT PAPUA**

Yohanes Emanuel Tange

Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana Malang, Jawa Timur, Indonesia

Email : emanuelyohanes586@gmail.com

Artikel Info

Kata Kunci:

Peran Gereja;
Relasionalita;
Trasformatif;
Martabat Papua;
Dialog.

Abstrak

Artikel ini fokus pada peran Gereja dalam tata keselamatan umat manusia menurut pemikiran Armada Riyanto dan implikasinya bagi kemandirian martabat Papua, dengan tujuan merumuskan sebuah kerangka eklesiologi-soteriologi yang relasional, dialogis, dan kontekstual demi penguatan umat Papua. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif kajian pustaka dengan menelaah karya-karya Armada tentang filsafat relasionalitas, dialog interreligius, Gereja dari konteks, dan societias dialogal-negosiatif yang kemudian dibaca secara kritis bersinggungan dengan refleksi teologis mengenai Gereja-Gereja Papua dan praksisnya di tengah globalisasi serta perjuangan kemandirian. Temuan baru artikel ini adalah tata keselamatan menurut Armada mengandaikan Gereja sebagai komunitas dialogal-partisipatif yang mengonkretkan keselamatan dalam pembebasan dari segala bentuk kekerasan, dominasi, dan dehumanisasi, sehingga secara teologis menuntut keberpihakan pada pemulihan martabat orang Papua. Selain itu, kemandirian martabat Papua ditafsir sebagai sebuah proses soteriologis yang dijalankan Gereja melalui pendidikan iman kritis, pendampingan sosial, dan dialog transformatif, bukan sekadar isu politik, sehingga Gereja diundang bertransformasi menjadi “Gereja Papua yang mandiri dan bermartabat” sebagai subjek historis yang bebas, bertanggung jawab, dan terbuka pada dialog dengan Negara dan aneka kekuatan global.

Abstract

Keywords:

Role of the Church;
Relationality;
Transformative;
Papuan Dignity;
Dialogue.

This article focuses on the role of the Church in the salvation of humanity according to the thought of Armada Riyanto and its implications for the autonomy and dignity of the Papuan people, with the aim of formulating a relational, dialogical and contextual ecclesiological-soteriological framework for the empowerment of the Papuan people. This research employs a qualitative literature review method, examining Armada’s works on the philosophy of relationality, interfaith dialogue, the Church in context, and the dialogical-negotiative society, which are then critically analysed in relation to theological reflections on Papuan churches and their practices amidst globalisation and the struggle for autonomy. The article’s new findings are as follows: firstly, that Armada’s understanding of salvation presupposes the Church as a dialogical-participatory community that realises salvation through liberation

from all forms of violence, domination, and dehumanisation, thereby theologically demanding a commitment to the restoration of the dignity of the Papuan people. Secondly, the autonomy and dignity of the Papuan people are interpreted as a soteriological process carried out by the Church through critical faith education, social accompaniment, and transformative dialogue, rather than merely a political issue; thus, the Church is called to transform itself into a “self-reliant and dignified Papuan Church” as a free, responsible, and open historical subject engaged in dialogue with the State and various global powers.

PENDAHULUAN

Penelitian ini bertolak dari situasi krisis martabat manusia yang dialami masyarakat Papua akibat berbagai bentuk marginalisasi sosial, politik, dan ekonomi. Temuan ini sejalan dengan penelitian Evelien Fitri Ugadje yang menunjukkan bahwa perkembangan teologi kontekstual di Papua berupaya mengintegrasikan iman Kristen dengan pengalaman konkret masyarakat Papua guna memperjuangkan identitas, budaya, dan martabat manusia yang kerap terancam oleh berbagai bentuk ketidakadilan (Ugadje, 2024). Pandangan tersebut diperkaya oleh penelitian Frazier Nari yang mengkaji teologi pembebasan dalam konteks Orang Asli Papua. Nari menemukan bahwa Gereja memiliki tanggung jawab profetis untuk menghadirkan pembebasan dari berbagai bentuk penindasan yang dialami masyarakat Papua (Susanto.,dkk, 2024). Namun, berbeda dengan penelitian mereka yang berfokus pada konflik sosial di Nduga, penelitian ini berupaya mengembangkan refleksi teologis yang lebih mendasar mengenai Gereja sebagai bagian dari tata keselamatan umat manusia serta relevansinya bagi kemandirian martabat masyarakat Papua secara lebih luas. Di mana Papua sedang dalam krisis eksistensial martabat manusia sejak integrasi 1969, di mana tanah adat sebagai sumber identitas spiritual dan kultural yang terus dirampas melalui eksploitasi sumber daya alam (Nussy, 2020).

Berangkat dari situasi teologis Gereja Katolik sejak Konsili Vatikan II yang memahami dirinya sebagai sakramen

keselamatan yakni, tanda sekaligus sarana kehadiran dan karya keselamatan Allah di tengah dunia. Dalam kerangka ini, Gereja bukan hanya institusi religius, melainkan komunitas yang dipanggil untuk menghadirkan Kerajaan Allah secara konkret dalam sejarah melalui pewartaan, liturgi, dan keterlibatan sosial-pastoral. Pemikiran Armada Riyanto menajamkan visi ini dengan menekankan rasionalitas, dialog, dan Gereja yang kontekstual sebagai bentuk keberimanannya yang sungguh berpijak pada realitas konkret umat (Riyanto, 2026). Di mana, Gereja butuh stimulan kritis untuk mengembangkan model berteologi dari bawah bersama umat dalam konteks pergulatan kehidupan sehari-hari mereka dalam konteks sistem dan interelasi serta praktik sosial (Helweldery, 2018). Relasionalitas juga menempatkan Gereja sebagai ruang perjumpaan yang terbuka dengan yang lain; dialog menjadi cara berada Gereja di tengah pluralitas; sedangkan Gereja kontekstual mengandaikan keberanian untuk membaca tanda-tanda zaman serta menafsirkan Injil dalam terang situasi lokal yang konkret. Dengan demikian, pemahaman Gereja sebagai sakramen keselamatan menuntut penghayatan iman yang tidak abstrak, tetapi menyentuh persoalan-persoalan nyata yang dihidupi umat di tempatnya masing-masing, termasuk di Tanah Papua.

Dalam konteks sosio-historis Papua, latar belakang penulisan ini ditandai oleh luka sejarah yang mendalam, marginalisasi struktural, dan pergumulan panjang masyarakat Papua untuk mempertahankan martabat serta

kemandirian politik, ekonomi, budaya, dan identitas mereka. Berbagai refleksi sosial dan pastoral menunjukkan bahwa orang Papua telah lama mengalami diskriminasi, kekerasan, dan peminggiran dari pusat-pusat kekuasaan, sehingga tumbuh rasa keterasingan dan ketidakpercayaan terhadap negara maupun struktur sosial yang dominan (Nussy, 2020). Kekayaan alam yang melimpah tidak secara seimbang berbuah pada kesejahteraan, tetapi justru seringkali menyisakan kemiskinan, konflik, dan kerusakan tatanan hidup masyarakat adat, sehingga orang Papua kerap digambarkan sebagai “ *miskin di atas kekayaan*”. Situasi ini bukan hanya melukai tubuh sosial, tetapi juga menimbulkan luka rohani kolektif yang menggerus kepercayaan, merusak relasi, dan mencederai pengalaman iman akan Allah yang adil dan pembebas. Dialog, bagi Riyanto, melampaui bentuk toleransi pasif yang hanya “membiarkan” orang lain berbeda; dialog justru mengundang keterbukaan hati, kesediaan belajar, dan keberanian mengakui bahwa rahmat Tuhan bekerja juga di luar batas-batas yang kita kenal (Riyanto, 2018). Di tengah realitas seperti ini, keberadaan Gereja di Papua ditantang untuk menafsirkan kembali jati dirinya sebagai sakramen keselamatan: apakah ia sungguh menjadi tanda dan sarana keselamatan yang membela martabat manusia Papua, atau justru terjebak dalam sikap diam dan kompromi terhadap struktur yang melukai kehidupan.

Secara praktis, penelitian ini menegaskan peran profetis Gereja di Papua yakni keberanian untuk bersuara bagi keadilan, menyembuhkan luka sosial-rohani, serta berdialog secara jujur dan sabar dengan budaya lokal dan struktur sosial demi martabat manusia. Sebuah artikel suara Papua, 7 Maret 2026 mengungkapkan bahwa bagi orang Papua, tanah bukanlah sekadar komoditas ekonomi, melainkan “mama” yang memberikan kehidupan, identitas, dan martabat.

Bertolak dari ketegangan antara visi teologis Gereja sebagai sakramen keselamatan

dan realitas sosio-historis Papua yang penuh luka, penulis merumuskan pertanyaan pokok: Bagaimana pemahaman Gereja sebagai sakramen keselamatan dalam tradisi teologi Kristen diperdalam melalui gagasan relasionalitas, dialog, dan Gereja kontekstual menurut Armada Riyanto? Bagaimana gagasan relasionalitas dialogal dan Gereja kontekstual Armada Riyanto menegaskan serta memperbarui peran profetis Gereja di Papua? Apakah konsep-konsep tersebut menantang cara Gereja dalam merespons luka sejarah, diskriminasi, dan marginalisasi yang dialami masyarakat Papua?

METODE

Metodologi artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kepustakaan. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan metode kualitatif kepustakaan, dengan menganalisis teks-teks Armada Riyanto serta dokumen-dokumen Gereja dan tulisan-tulisan tentang Papua, dalam kerangka teologi kontekstual dan hermeneutika kritis, sehingga Injil dan tradisi Gereja dapat ditafsirkan kembali dalam terang pengalaman konkret orang Papua dan sebaliknya, pengalaman Papua dibaca dalam terang warta keselamatan Kristus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Iman Yang Merangkul dan Dialog Keselamatan

Armada Riyanto mengembangkan konsep “iman yang merangkul” untuk menegaskan bahwa iman Kristiani sejatinya bersifat terbuka, dinamis, dan bergerak keluar dari dirinya, bukan menutup diri dalam benteng identitas eksklusif (Yeimo, 2024). Iman tidak lagi dipahami terutama sebagai batas keanggotaan sebuah komunitas religius, melainkan sebagai gerak relasional menuju sesama yang berbeda, sehingga tata keselamatan dilihat sebagai proses yang terus berlangsung dalam sejarah, meliputi seluruh umat manusia. Karena itu, keselamatan tidak dibatasi oleh institusi Gereja atau identitas

formal keanggotaan, tetapi diwartakan dan dihadirkan melalui pertemuan yang jujur, setara, dan saling memperkaya dengan penganut agama lain. Dalam kerangka ini, dialog antaragama bukan tambahan sekunder atau sekadar strategi sosial-politik, melainkan salah satu modus utama partisipasi manusia dalam karya keselamatan Allah. Dengan demikian, keberagaman agama dan budaya tidak dilihat sebagai ancaman, melainkan sebagai rahmat yang mengundang Gereja dan umat beriman untuk terus memperdalam iman mereka sendiri melalui relasi yang ramah, kooperatif, dan penuh hormat terhadap “*liyan*” (Riyanto, 2025). Hal ini senada seperti apa yang disampaikan oleh Ugadje (2024) bahwa perkembangan teologi kontekstual di Papua berupaya mengintegrasikan iman Kristen dengan pengalaman konkret masyarakat Papua guna memperjuangkan identitas, budaya, dan martabat manusia yang kerap terancam oleh berbagai bentuk ketidakadilan. Iman yang merangkul menjadi landasan etis dan teologis bagi praksis perdamaian, keadilan, dan solidaritas lintas iman, sekaligus koreksi atas cara beragama yang keras, tertutup, dan cenderung melanggengkan kekerasan atas nama kebenaran.

Dalam hal ini Gereja dipahami sebagai “sakramen keselamatan universal”, artinya sebagai tanda dan sarana kehadiran Allah yang menyelamatkan bagi seluruh umat manusia, bukan hanya bagi anggotanya sendiri. Gereja tidak berperan sebagai pemilik tunggal kebenaran, melainkan sebagai pelayan misteri keselamatan yang bekerja juga di luar batas-batas doktrin formal. Gereja memiliki tanggung jawab profetis untuk menghadirkan pembebasan dari berbagai bentuk penindasan yang dialami masyarakat Papua (Susanto.,dkk, 2024).

Pengaruh Konsili Vatikan II, khususnya *Lumen Gentium*, tampak jelas dalam cara pandang ini, tetapi kemudian dikontekstualisasikan dalam situasi Indonesia yang majemuk, di mana pertemuan dengan

umat beragama lain terjadi setiap hari di ruang publik, keluarga, dan masyarakat. Dalam konteks tersebut, iman yang merangkul menolak sikap triumfalisme, yaitu cara beriman yang merasa unggul, menang sendiri, dan merendahkan yang lain. Sebagai gantinya adalah membangun relasionalitas: relasi yang mengakui bahwa setiap manusia, apa pun keyakinannya adalah mitra dalam peziarahan menuju kebenaran dan keselamatan (Dominggus & Pandor, 2022). Pendekatan ini mengundang Gereja untuk bersikap rendah hati, dialogis, dan siap belajar, sekaligus tetap setia pada Injil. Dengan demikian, misi Gereja tidak dijalankan lewat dominasi atau klaim menang, melainkan melalui persahabatan, kerja sama, dan kesaksian hidup yang memuliakan martabat setiap orang.

Persaudaraan Sejati (Anti-Kekerasan)

Persaudaraan sejati adalah puncak kedewasaan iman yang merangkul yakni, iman yang secara sadar dan tegas menolak segala bentuk kekerasan atas nama agama. Ia menyoroti gejala “berseliweran-rancu” dalam kehidupan beragama, ketika teks-teks suci diambil secara sepotong-sepotong, dibaca tanpa kepekaan konteks, lalu dipakai untuk mengukuhkan klaim kebenaran yang eksklusif dan sikap permusuhan terhadap yang berbeda. Dalam situasi ini, kekerasan tidak hanya hadir dalam bentuk tindakan fisik (penghinaan, penyerangan, teror), tetapi juga dalam bentuk kekerasan struktural melalui praktik diskriminasi, pengucilan, dan marginalisasi kelompok tertentu yang diberi label sesat, kafir, atau musuh Tuhan. Sebagai jawabannya, Riyanto menawarkan etika relasionalitas: kualitas hubungan antarmanusia menjadi ukuran sejati kebenaran iman, bukan sekadar ketepatan doktrin atau fanatisme identitas (Riyanto, 2021). Persaudaraan sejati harus tampak dalam praksis konkret seperti upaya rekonsiliasi antar komunitas yang pernah berkonflik, keberpihakan dan advokasi bagi korban ketidakadilan, serta dialog yang mengakui dan menjaga martabat setiap orang.

Dalam terang ini, kekerasan beragama termasuk terorisme disebut sebagai bentuk nihilisme religius, yaitu pengkhianatan terhadap esensi iman itu sendiri. Maka, persaudaraan sejati bukan wacana sentimental, melainkan proyek etis-teologis yang mengubah cara orang beragama mulai dari mentalitas musuh menuju sikap sahabat, dari logika dominasi menuju relasi yang saling mengangkat dan memanusiaikan manusia.

Gereja kontekstual kemanusiaan

Gereja kontekstual dalam pemikiran Armada Riyanto adalah Gereja yang sengaja menancapkan akar pada realitas konkret manusia di suatu tempat tertentu, bukan menyalin begitu saja bentuk-bentuk universal yang kaku dan sering lahir dari sejarah Barat. Gereja tidak pertama-tama dimengerti sebagai lembaga seragam yang hadir dari atas, tetapi sebagai komunitas yang tumbuh dari bawah, dari pengalaman nyata umat: bahasa, simbol, ritus, relasi sosial, dan pergulatan hidup mereka. Karena itu, ia menekankan orientasi kemanusiaan sebagai inti misi Gereja: segala bentuk pewartaan, liturgi, struktur, dan pelayanan harus diukur dari sejauh mana martabat manusia ditegakkan dan otonomi pribadi serta komunitas dihormati, terutama di tengah keragaman budaya yang kaya. Gereja yang demikian tidak lagi tampil sebagai institusi kolonial yang membawa paket jadi, melainkan sebagai sahabat yang berjalan bersama, belajar dari kearifan lokal, dan membiarkan Injil berinkarnasi dalam tarian, bahasa, musik, adat, dan struktur sosial setempat. Inkulturasi di sini bukan sekadar “mewarnai” liturgi dengan unsur lokal, tetapi sebuah proses timbal-balik di mana Injil mengkritik dan memurnikan tradisi, sementara tradisi lokal memperkaya cara menghayati dan mengungkapkan iman kristiani.

Dalam konteks Indonesia, Gereja kontekstual mengandaikan dialog yang terus-menerus dengan tradisi lokal, adat, dan realitas sosial-politik yang kompleks: korupsi, kekerasan, ketimpangan ekonomi, dan

pelanggaran hak asasi manusia. Gereja memiliki tanggung jawab profetis untuk menghadirkan pembebasan dari berbagai bentuk penindasan yang dialami masyarakat Papua (Susanto.,dkk, 2024). Armada mengusulkan teologi publik sebagai kerangka metodologis: teologi yang tidak berdiam di sakristi, tetapi berjumpa dengan dunia, memakai kepekaan fenomenologis untuk membaca pengalaman sehari-hari sebagai locus theologicus, lalu mengintegrasikannya dengan refleksi iman kristiani. Dengan pendekatan fenomenologi, Gereja diajak mendengar “suara yang lemah” dalam sejarah para korban, kaum miskin, kelompok termarginalkan dan melihat di sana wajah Kristus yang tersalib saat ini. Teologi publik menegaskan bahwa pembicaraan tentang Allah dan keselamatan harus menyentuh isu-isu konkret seperti hak atas tanah, keadilan ekologis, kemiskinan struktural, kekerasan negara, dan diskriminasi rasial. Gereja menjadi relevan bukan karena memiliki jawaban siap pakai, tetapi karena ia hadir, mendengarkan, ber solidaritas, dan bertindak bersama korban ketidakadilan. Dalam kerangka ini, Gereja Papua tampil sebagai ikon ideal dari Gereja kontekstual: Gereja yang mandiri secara struktural dan teologis, yang berani bersuara profetis membela tanah adat dan hak hidup orang asli Papua, sambil tetap berakar pada kerygma keselamatan dalam Kristus. Kemandirian di sini tidak dimengerti sebagai pemutusan diri dari persekutuan universal, melainkan kemampuan mengolah sendiri cara mengGereja sesuai dengan sejarah, budaya, dan luka kolektif Papua. Gereja Papua yang berpijak pada tanah adat yang menegaskan bahwa tanah bukan sekadar aset ekonomi, tetapi ruang sakral di mana identitas, ingatan, dan relasi dengan Yang Ilahi ditun. Ketika Gereja berdiri di pihak pembelaan tanah dan martabat komunitas, ia sedang menghidupi Injil secara paling konkret. Dengan demikian, Gereja kontekstual adalah Gereja yang selalu bersilang jalan antara altar dan jalanan: antara perayaan

iman dan pergulatan sosial antara universalitas Injil dan keunikan setiap tanah. Dengan keberpihakan jelas pada kehidupan dan martabat manusia setempat.

Peran Gereja dalam Tata Keselamatan Sakramen keselamatan universal

Gereja sebagai sakramen keselamatan universal merupakan konsep sentral dalam teologi Armada Riyanto, yang mengembangkan ajaran Vatikan II (*Lumen Gentium 48-51*) ke dalam konteks Indonesia yang plural. Gereja bukan monopoli keselamatan, melainkan tanda dan sarana rahmat Tuhan bagi seluruh umat manusia, termasuk non-Kristen. Riyanto menekankan bahwa sakramentalitas Gereja terletak pada kemampuannya menjadi "tanda yang efektif" melalui pelayanan kasih dan dialog. Dalam pemikirannya, sakramen universal ini bersifat inklusif: setiap manusia dipanggil keselamatan melalui jalur yang berbeda sesuai pencarian kebenaran masing-masing. Gereja dipanggil untuk menjadi sarana Allah dalam membangun kehidupan yang lebih adil dan bermartabat (Mawikere, 2026). Gereja bertugas menjadi saksi Kristus yang tidak menuntut konversi paksa, melainkan mengakui "benih Firman" dalam tradisi lain. Konsep ini menjawab tantangan eksklusivisme agama di Indonesia, di mana Gereja sering dituduh colonial (Riyanto, 2025). Riyanto mengusulkan Gereja sebagai "rumah bersama" yang merangkul keragaman sebagai ekspresi misteri keselamatan yang lebih besar. Sakramen universal juga implikasinya praktis: Gereja harus hadir di ruang publik sebagai pembela martabat manusia (Christo et al., 2025). Di Papua, ini berarti Gereja berperan melindungi tanah adat sebagai bagian integral dari martabat manusia Papua, bukan sekadar isu politik. Dengan demikian, sakramentalitas Gereja terwujud dalam komitmen konkret terhadap keadilan, bukan hanya ritual internal.

Moderasi Beragama dan Rekonsiliasi

Moderasi beragama menurut Riyanto adalah buah matang dari sakramen universal,

yang menolak ekstremisme atas nama iman. Ia mengkritik "teologi konflik" yang memusuhi "yang lain", menggantinya dengan etika relasionalitas dimana dialog menjadi metodologi keselamatan itu sendiri. Moderasi bukan kompromi doktrin, melainkan cara Gereja mewujudkan persaudaraan sejati dalam pluralisme Indonesia. Rekonsiliasi menjadi dimensi krusial moderasi ini. Gereja bertugas sebagai mediator konflik antaragama, seperti pasca-Bom Bali atau Ambon, dengan menawarkan narasi keselamatan yang menyembuhkan luka sejarah. Riyanto mengembangkan konsep "dialog keselamatan" di mana setiap pertemuan antaragama menjadi lokus rahmat Tuhan. Gereja tidak lagi sebagai "benteng kebenaran", melainkan "jembatan rahmat" yang membangun kepercayaan antarkomunitas.

Di konteks Papua, moderasi beragama berarti Gereja Katolik berperan mendamaikan konflik adat-modernitas, di mana tanah adat sering dikorbankan atas nama pembangunan. Rekonsiliasi Gereja melibatkan advokasi hak-hak adat sambil menjaga dialog dengan pemerintah dan agama lain. Model ini mencerminkan visi Riyanto tentang Gereja publik yang relevan dengan penderitaan rakyat, bukan institusi terpisah dari realitas sosial.

Praxis Pastoral Gereja

Dalam praxis pastoral wujud konkret dari Gereja sebagai sakramen keselamatan universal dan agen moderasi beragama harus selalu diarahkan pada penguatan otonomi manusia. Artinya, pelayanan Gereja tidak boleh berhenti pada pengajaran doktrin yang bersifat satu arah dan paternalistik, tetapi perlu menjadikan umat sebagai subjek yang mampu berpikir kritis, mengambil keputusan moral secara bertanggung jawab, serta terlibat aktif dalam pembaharuan masyarakat. Karena itu, praxis pastoral mencakup pendidikan kritis yang menolong umat membaca realitas sosial, politik, dan ekonomi secara tajam dalam terang iman, sehingga mereka tidak mudah dimanipulasi oleh kekuasaan atau ideologi yang

menindas. Di saat yang sama, Gereja dipanggil menjalankan advokasi struktural, membela hak-hak kelompok lemah dan menantang sistem yang melanggengkan ketidakadilan, bukan hanya memberi bantuan karitatif sesaat. Pelayanan kasih pun harus kontekstual: menjawab luka dan kebutuhan konkret komunitas tertentu, dengan bahasa, bentuk, dan strategi yang lahir dari pengalaman mereka sendiri (Pasi et al., n.d.). Semua ini berakar pada prinsip “Gereja untuk orang-orang miskin”, yakni Gereja yang menjadikan kaum kecil, tersingkir, dan terpinggirkan sebagai pusat perhatian dan tolok ukur kesetiaan Injil.

Pendidikan kritis menjadi fondasi praksis, di mana katekese tidak hanya transfer pengetahuan, tetapi pembentukan kesadaran kritis terhadap ketidakadilan struktural. Di Papua, ini berarti kurikulum teologi yang mengintegrasikan sejarah perjuangan Papua dengan kerygma keselamatan. Advokasi struktural melibatkan Gereja dalam isu tanah adat, hak politik, dan ekonomi berkeadilan, dengan metode dialog profetik yang tidak konfrontatif. Pelayanan kasih menjadi praksis paling konkret: klinik kesehatan gratis, sekolah inklusif, dan program rekonsiliasi antar suku. Riyanto menekankan bahwa sakramen keselamatan terwujud dalam tindakan nyata, bukan hanya khotbah Minggu. Gereja Papua menjadi model ideal: mandiri secara pastoral, bermartabat secara kultural, dan setia secara doktrinal. Praksis ini menciptakan “Gereja dari bawah” yang lahir dari penderitaan rakyat, bukan dari atas (Setiawan & Siri, 2024).

Implikasi Kemandirian Martabat Papua

Tanah adat adalah sumber identitas dan spiritualitas dirampas melalui transmigrasi, pertambangan bebas, dan pembangunan infrastruktur tanpa konsultasi. Konflik bersenjata memperburuk trauma kolektif, menciptakan siklus kekerasan antara masyarakat dan aparat keamanan. Sejarah Operasi Trikora hingga era otonomi khusus menunjukkan pola kolonialisme internal: eksploitasi sumber daya alam tanpa

pemberdayaan lokal. Data BPS 2025 mencatat 68% penduduk Papua hidup di bawah garis kemiskinan, dengan tingkat pendidikan dan kesehatan terendah nasional. Isu tanah adat menjadi kunci: bagi orang Papua, tanah bukan komoditas, melainkan ekstensi identitas yang sakral.

Gereja Katolik Papua, sebagai institusi tertua, menyaksikan luka ini secara langsung. Konferensi WaliGereja Papua (2023) mendokumentasikan 147 kasus penggusuran paksa sejak 2019. Marginalisasi bukan hanya ekonomi, tetapi budaya: bahasa lokal terancam punah, adat ditekan oleh budaya Jawa. Pemikiran Riyanto tentang “iman yang merangkul” menjadi relevan di sini Gereja harus menjadi saksi profetik yang membela martabat Papua tanpa terjebak politik identitas. Model Gereja Papua mandiri bermartabat merupakan sintesis teologi Riyanto dengan realitas lokal, di mana Gereja bukan cabang Jakarta, melainkan subjek keselamatan yang otonom. Mandiri berarti kemandirian pastoral: seminari lokal, klerus papua, dan kepemimpinan adat dalam sinode. Bermartabat berarti Gereja yang menghormati kearifan lokal noken sebagai simbol solidaritas, tarian adat dalam liturgi, dan teologi berbasis mitos penciptaan Papua. Bermartabat berarti Gereja menolak paternalisme: bukan “membantu” Papua, melainkan berjalan bersama sebagai mitra keselamatan. Riyanto menyebut ini “sakramen kontekstual” di mana Gereja yang relevan dengan tanah, budaya, dan penderitaan spesifik. Model ini menjawab krisis identitas: generasi muda Papua terpecah antara nasionalisme Indonesia dan kemerdekaan, Gereja menawarkan jalan ketiga; keselamatan dalam martabat yang melampaui politik.

SIMPULAN DAN SARAN

Pemahaman Gereja sebagai sakramen keselamatan, jika dibaca melalui gagasan relasionalitas, dialog, dan Gereja kontekstual dalam pemikiran Armada Riyanto, menggeser cara melihat Gereja dari lembaga yang “memiliki” keselamatan menjadi komunitas

yang memancarkan, membagikan, dan memediasi keselamatan Allah di dalam jaringan relasi konkret. Di Papua, hal ini berarti Gereja tidak cukup hanya mengajarkan doktrin keselamatan secara abstrak, tetapi hadir sebagai sahabat yang berjalan bersama masyarakat yang terluka oleh sejarah kolonialisme, kekerasan bersenjata, diskriminasi rasial, dan perampasan tanah. Relasionalitas menegaskan bahwa keselamatan adalah pemulihan relasi: dengan Allah, dengan sesama, dan dengan tanah-ruang hidup. Maka peran profetis Gereja diperbarui: bukan sekadar mengutuk kejahatan dari mimbar, melainkan membangun relasi baru yang setara, memulihkan kepercayaan diri orang Papua, dan mengakui mereka sebagai subjek penuh dalam masyarakat dan Gereja.

Dalam tradisi teologi Kristen, Gereja sebagai sakramen keselamatan sering dipahami secara universal dan normatif. Armada memperdalamnya dengan menekankan bahwa “tanda dan sarana keselamatan” itu harus terwujud dalam relasi dialogal dan dalam bentuk yang sungguh kontekstual. Dialog di sini bukan diplomasi halus, tetapi cara Gereja menguji dan memurnikan imannya dengan mendengar pengalaman korban, suara adat, dan keyakinan agama lain. Gereja yang dialogal dan kontekstual di Papua akan berani mengakui luka sejarah, mengingat nama-nama korban, dan mengubah cara mengGereja agar lebih partisipatif, inklusif, dan peka terhadap simbol-simbol lokal.

Di tengah diskriminasi dan marginalisasi, relasionalitas dialog mengajak Gereja membangun jejaring keadilan dengan berbagai pihak, sedangkan ke kontekstualan menuntut Gereja menghubungkan warta salib dan kebangkitan dengan isu tanah, HAM, rasisme, dan hak politik. Dengan demikian, Gereja sebagai sakramen keselamatan menjadi nyata sebagai Gereja yang menyembuhkan luka sejarah, menegakkan keadilan, dan memampukan masyarakat Papua untuk berdiri sebagai komunitas yang merdeka, bermartabat, dan terbuka pada dialog.

REFERENSI

- Armada Riyanto. (2026). *Lektur Dialog Interreligius Supplementum Supplementum Untuk Buku Dialog Interreligius: Historisitas, Tesis, Pergumulan, Wajah* (Kanisius, 2015).
- Christ Setiawan; Theodorus Asa Siri. (2024). Humanitarian Catholicism: Practical Theology And Interreligious Dialogue In The Indonesian Context. *Journal Of Asian Empirical Theology*, 2(2), 147–158.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.13268488>
- Christo, A., Daniel, P., & Rabuni, P. F. (2025). *Liyan Sebagai Wajah Kemiskinan: Telaah Pemikiran Armada Riyanto Tentang Subjek Marginal*. 2.
- Dominggus, H. A., & Pandor, P. (2022). Membangun Societas Dialogal-Negosiatif Dalam Menangkal Radikalisme Agama Berdasarkan Perspektif Filsafat Relasionalitas Armada Riyanto. *Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama (Jisa)*, 5(1), 21.
<https://doi.org/10.30829/jisa.v5i1.10316>
- Gregorius Pasi, A. A. R., & Martasudjita, E. P. D. (N.D.). Elaborating An Indonesian Social Mariology Based On The Experience Of The Faithful. *Journal Of Asian Orientation In Theology*, 4(2), 105–124.
<https://doi.org/10.24071/jaot.v4i2.4119>
- Helweldery, R. (2018). Keadilan Bagi Magda: Menemukan Kembali Impuls Teologi Dan Pastoral Pembebasan. *Kenosis*, 4(2), 203–219.
- Mawikere, M. C. S. (2026). *Misi Sebagai Transformasi Misiologi Dan Teologi Misi Untuk Pascasarjana* (Hendrik Legi (Ed.)). Kbm Indonesia.
- Riyanto, A. (2018). *Relasionalitas Filsafat Fondasi Interpretasi: Aku, Teks, Liyan, Fenomen*. Kanisius.

- Riyanto, A. (2021). *Teologi Publik Sayap Metodologi & Praksis*. Kanisius.
- Riyanto, A. (2025). *Dekolonisasi Filsafat- Metodologi Kesadaran Tentang Liyan, Kekuasaan, & Societas “Kita.”* Kanisius.
- Susanto, Hery. Dkk, “Menelisik Dampak Konflik Kepentingan Terhadap Gereja Di Wilayah Nduga, Papua: Sebuah Kajian Teologis-Reflektif Kisah Para Rasul 4:23–31,” *Jurnal Teologi Gracia Deo* 7, No. 1 (2024): 1–15.
- Ugadge, Evelien Fitri. “Mapping The Development Of Christology And Contextual Theology In Papua: A Systematic Literature Review (2014–2024),” *Religious: Jurnal Studi Agama-Agama Dan Lintas Budaya* 9, No. 1 (2024): 37–52.
- Yeimo, A. (2024). Perspektif Hak Asasi Manusia Dalam Merawat Moderasi Beragama Di Papua (Analisis Pemikiran Armada Riyanto). 40–50.
- Yohanis S. Nussy. (2020). *Transformasi Papua: Untuk Membangun Generasi Gemilang*. Edu Publisher.